





KATA PENGANTAR

Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*goodpublic governance*) dalam berbagai aspek, salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Secara hierarki penyusunan rencana kerja SKPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.


Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan telah berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain perencanaan strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok merumuskan kebijakan dan koordinasi di Bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau.

Pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan azas Aparatur Sipil Negara dalam berbagai kebijakan program dan kegiatan diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi menjadi birokrasi bersih, kompeten dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Ini adalah pekerjaan besar bagi jajaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau yang diserahkan tugas untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan azas Aparatur Sipil Negara secara konsisten terus menegakan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam setiap peran dan tugas.

Untuk mewujudkan Pemerintahan daerah yang profesional serta mampu memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan perencanaan dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif , efisien, dan dinamis. Sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dan mensukseskan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan akuntabilitas dibuat haruslah memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat obyektif dan wajar.

Laporan Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah tahun 2015 memuat pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan permasalahan yang dihadapi beserta solusi maupun alternatif pemecahan masalah tersebut. Laporan ini juga dapat dijadikan sebagai data guna peningkatan kinerja Badan kepegawaian dimasa yang akan datang.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
PROVINSI RIAU



Drs.ASRIZAL, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19650325 198702 1001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 LatarBelakang.....	1
1.2 Gambaran Umum	2
1.3 Landasan Hukum	13
1.4 Maksud dan Tujuan	14
BAB II : RENCANA STRATEGI.....	16
2.1 Rencana Strategik	16
2.1.1 Visi dan Misi.....	16
2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator, Strateegi Kebijakan	17
BAB III : RENCANA KINERJA TAHUNAN	23
3.1 Indikator Kinerja Utama	23
3.2 Program dan Kegiatan.....	24
3.3 Alokasi Anggaran	41
BAB IV. : PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Gambar Struktur Organisasi	4
Tabel 1.2.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015	6
Tabel 1.3.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2015	6
Tabel 1.4.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2015	7
Tabel 1.5.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015	7
Tabel 1.6.	Sarana dan Prasarana Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau	10
Tabel 2.1.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau	18
Tabel 3.1.	Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau	23
Tabel 3.2.	Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun 2015	30
Tabel 3.3.	Alokasi Keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun 2015	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau merupakan bagian dari organisasi pemerintahan yang mempunyai peran sebagai pembina dan pengembang sumber daya aparatur daerah Riau. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian serta ditugaskan melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin terwujud tanpa didukung oleh Pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang dan tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara Negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan serta manfaat yang dihasilkan.

Untuk mewujudkan Pemerintahan daerah yang profesional serta mampu memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan perencanaan dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan dinamis. Sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dan mensukseskan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan akuntabilitas dibuat haruslah memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat obyektif dan wajar.

Laporan Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah tahun 2015 memuat pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan permasalahan yang dihadapi beserta solusi maupun alternatif pemecahan masalah tersebut. Laporan ini juga dapat dijadikan sebagai data guna peningkatan kinerja Badan kepegawaian dimasa yang akan datang.

1.2. Gambaran Umum

1.2.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau

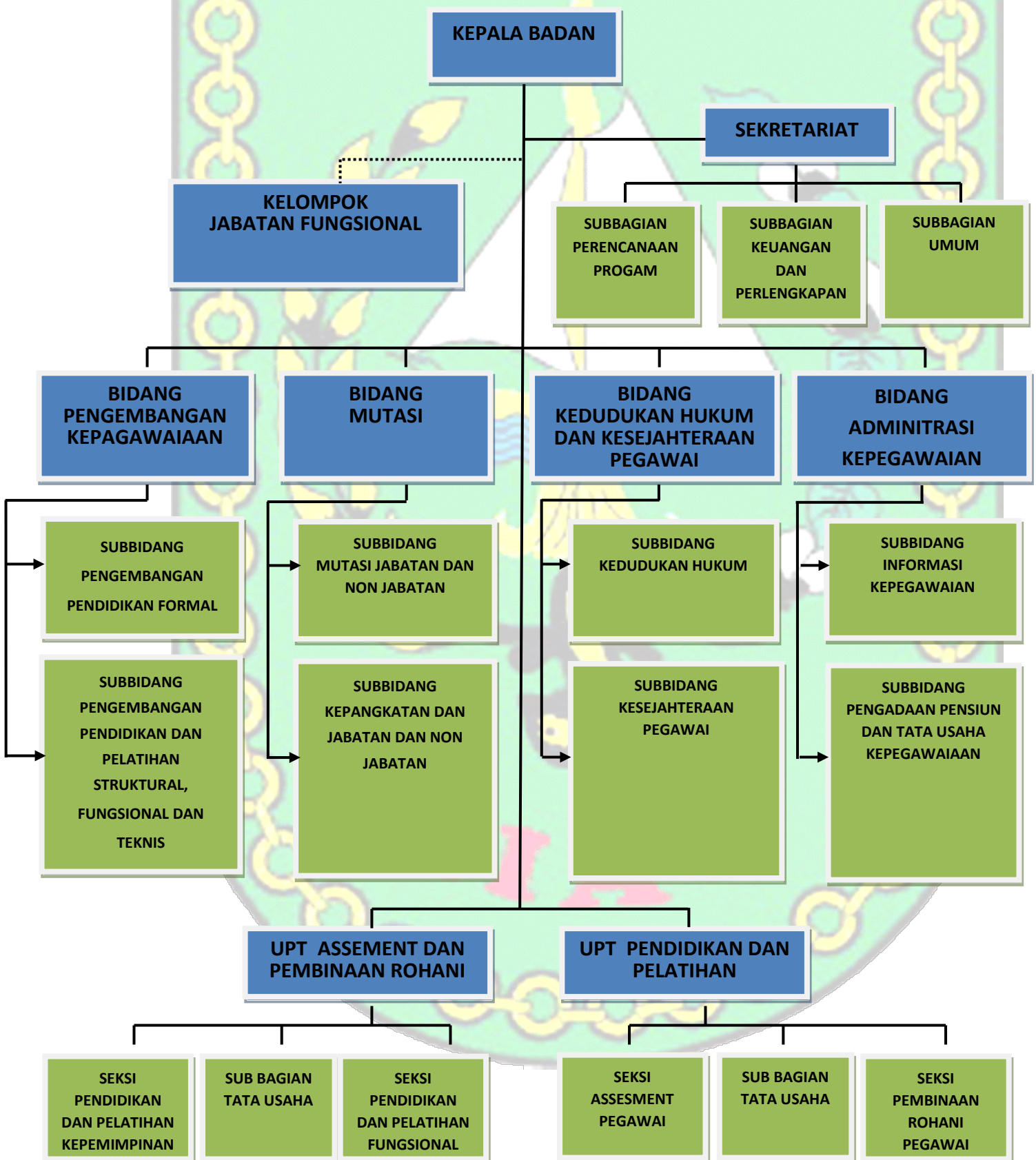
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, serta uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau. Berdasarkan Perda dan Pergub diatas susunan struktur organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris :
 - a. Subbagian Perencanaan Program;
 - b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengembangan Pegawai :
 - a. Subbidang Pengembangan Pendidikan Formal Pegawai;
 - b. Subbidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional dan Teknis.
4. Bidang Mutasi :
 - a. Subbidang Mutasi Jabatan dan Non Jabatan;
 - b. Subbidang Kepangkatan Jabatan dan Non Jabatan.
5. Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai :
 - a. Subbidang Kedudukan Hukum;
 - b. Subbidang Kesejahteraan Pegawai.
6. Bidang Administrasi Kepegawaian :
 - a. Subbidang Informasi Kepegawaian;
 - b. Subbidang Pengadaan, Pensiun PNS dan Tata Usaha Kepegawaian.
7. UPT Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan;
 - c. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Teknis.

8. UPT Assesment dan Pembinaan Rohani Pegawai
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Assesment;
 - c. Seksi Pembinaan Rohani Pegawai.

Tabel 1.1. Gambar Struktur Organisasi

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
PROVINSI RIAU**



1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau.

Sesuai dengan tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau menjelaskan bahwa BKP2D Provinsi Riau mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian daerah serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, BKP2D Provinsi Riau mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Mutasi, Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai dan Bidang Administrasi Kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Sekretariat, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Mutasi, Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai dan Bidang Administrasi Kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Mutasi, Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai dan Bidang Administrasi Kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.2.3 Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau per 01 Januari 2015 sebanyak 157 orang dengan data sebagai berikut :

Tabel 1.2. Jumlah PNS BKP2D Provinsi Riau Tahun 2015
Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-Laki	Perempuan	
107	53	160

Dari jumlah tersebut maka dapat terlihat bahwasanya 66 % pegawai BKP2D Provinsi Riau berjenis kelamin laki-laki. Dari jumlah tersebut maka ditampilkan data berdasarkan golongan sebagai berikut :

Tabel 1.3. Jumlah PNS BKP2D Provinsi Riau Tahun 2015
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Ket	Golongan I		Golongan II		Golongan III		Golongan IV	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Per Jenis Kelamin	2	1	33	12	53	36	19	4
Sub.Total	3		45		89		23	
Total	160							

Berdasarkan data tersebut diatas terdapat 89 orang yang merupakan Golongan III dari 160 orang Pegawai BKP2D Provinsi Riau, dan terdapat Golongan I berjumlah 3 orang. Jumlah pejabat BKP2D berdasarkan jabatan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4. Jumlah Pejabat BKP2D Provinsi Riau Tahun 2015
Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Eselon II	1		1
Eselon III	6	1	7
Eselon IV	8	9	17
Widyaiswara	16	2	18
Arsiparis	1		1
Auditor Kepegawaian	2	2	4
Perencanaan	1		1
Analisis Kepegawaian		2	2
Jumlah	35	16	51

Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel Sumber Daya BKP2D Provinsi Riau dibawah ini :

Tabel 1.5. Sumber Daya BKP2D Provinsi Riau Tahun 2015
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JABATAN	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Kepala Badan	1		1
2	Sekretaris Badan	1		1
3	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai	1		1

4	Kepala Bidang Bidang Mutasi		1	1
5	Kepala Bidang Kedudukan Hukum dan Kesra	1		1
6	Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian	1		1
7	Kepala UPT Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	1		1
8	Kepala UPT Assesment dan Pembinaan Rohai Pegawai	1		1
8	Kepala Subbag Perencanaan Program	1		1
9	Kepala Subbag Keuangan dan Perlengkapan		1	1
10	Kepala Subbag Umum Dan Kepegawaian	1		1
11	Kepala Subbidang Pengembangan Pendidikan Formal Pegawai		1	1
12	Kepala Subbidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional dan Teknis	1		1
13	Kepala Subbid Mutasi Jabatan dan Non Jabatan		1	1
14	Kepala Subbid Kepangkatan Jabatan dan Non Jabatan	1		1
15	Kepala Subbid Kedudukan Hukum		1	1
16	Kepala Subbid Kesejahteraan Pegawai		1	1
17	Kepala Subbid Informasi Pegawai		1	1
18	Kepala Subbidang Pengadaan, Pensiun PNS dan Tata Usaha Kepegawaian		1	1

19	Kepala Seksi Tata Usaha UPT Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		1	1
20	Kepala Seksi Pelatihan Struktural UPT Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	1		1
21	Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan Fungsional UPT Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	1		1
22	Kepala Seksi Tata Usaha UPT Assesment dan Pembina Rohani Pegawai		1	1
23	Kepala Seksi Assesment UPT Assesment dan Pembinaan Rohani Pegawai	1	1	1
23	Kepala Seksi Pembinaan dan Rohani UPT Assesment dan Pembinaan Rohani Pegawai	1	1	1
21	Jabatan Fungsional			
	Widyaiswara	16	2	18
	Arsiparis	1		1
	Auditor Kepegawaian	2	2	4
	Analisis Kepegawaian		2	2
	Perencanaan	1		1
22	Pelaksana/Fungsional Umum	78	38	109
TOTAL		106	54	160

1.2.4 Kondisi Sarana dan Prasarana.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusianya saja. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga tercapai kualitas kerja yang baik. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sedangkan prasarana adalah segala yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses atau usaha agar tujuan organisasi tercapai.

Umumnya sarana dan prasarana digunakan antara lain untuk menunjang kegiatan ketata-usahaan/administrasi kantor dan peningkatan kualitas kinerja Sumber Daya Aparatur serta penunjang pelaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi riau. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6. Sarana dan Prasarana BKP2D Provinsi Riau Tahun 2015

A. Tanah dan Bangunan				
1	Luas tanah gedung kantor BKP2D	:	3.212	M ²
2	Luas tanah kantor UPT Diklat jalan Ronggo Warsito	:	13.880	M ²
3	Luas tanah UPT Diklat Pasir Putih	:	149.410	M2
B. Alat-Alat Angkutan				
1	Kendaraan bermotor:			
	- Roda empat	:	8	unit
	- Roda dua	:	3	unit
2	Mesin ketik manual standar	:	2	unit
3	Mesin ketik elektronik	:	1	unit
4	Mesin fotocopy dengan kertas folio	:	2	unit
5	Lemari besi	:	1	unit
6	Rak besi/metal	:	5	unit
7	Rak kayu	:	6	unit
8	Filling besi/metal	:	4	unit
9	Rotary filling	:	1	unit
10	Lemari kayu	:	9	unit
11	Papan pengumuman	:	1	unit
12	White board	:	2	unit
13	Alat pemotong kertas	:	1	unit
14	Alat kantor lainnya	:	7	unit
15	Lemari kayu	:	3	unit
16	Meja kayu/rotan	:	13	unit
17	Tempat tidur besi/metal (lengkap)	:	1	unit
18	Tempat tidur kayu (lengkap)	:	200	Unit

19	Meja rapat	:	36	unit
20	Meja makan	:	10	unit
21	Meja panjang	:	1	unit
22	Kursi rapat	:	157	unit
23	Kursi tamu	:	1	unit
24	Kursi tangan	:	1	unit
25	Kursi putar	:	3	unit
26	Kursi biasa	:	1	unit
27	Bangku tunggu	:	1	unit
28	Meja Komputer	:	51	unit
29	Kasur	:	100	unit
30	Bantal	:	100	unit
31	Sprei	:	100	unit
32	Sofa	:	7	unit
33	Lemari Pakaian	:	16	Unit
34	Mesin penghisap debu	:	2	unit
35	Lemari es	:	1	unit
36	AC unit	:	54	unit
37	AC split	:	9	unit
38	Kipas angin	:	100	unit
39	Sound System	:	1	unit
40	Wireless	:	1	unit
41	Unit Power Supply	:	59	unit
42	Stabilisator	:	2	unit
43	Camera Video	:	1	unit
44	Dispenser	:	17	unit
45	Alat rumah tangga lain-lain	:	202	unit
46	Gorden	:	2	unit
47	Alat pemadam portable	:	2	unit
48	PC unit	:	151	unit
49	Laptop	:	7	unit
50	Note book	:	37	unit
51	Hard disk	:	1	unit
52	Scanner	:	5	Unit
53	Monitor	:	50	unit
54	Printer	:	91	unit
55	Server	:	2	unit
56	Peralatan personal komputer lain-lain	:	11	unit
57	Peralatan Jaringan Lain-lain	:	2	unit
58	Meja kerja pegawai non struktural	:	1	unit
59	Meja kerja pejabat lain-lain	:	11	unit
60	Meja Rapat Pejabat eselon II	:	1	Unit
61	Meja rapat pejabat eselon III	:	3	unit
62	Meja rapat pejabat lain-lain	:	5	unit
63	Kursi kerja pejabat eselon II	:	1	unit
64	Kursi kerja pejabat eselon III	:	3	unit
65	Kursi kerja pegawai non struktural	:	100	unit
66	Kursi kerja pejabat lain-lain	:	22	unit
67	Kursi rapat pejabat eselon III	:	1	Unit

68	Kursi tamu diruangan pejabat lain-lain	:	50	unit
C. Alat Studio dan Alat Komunikasi				
1	Camera + attachment	:	2	unit
2	Proyektor + attachment	:	17	unit
3	Microphone/wireless mic	:	12	unit
4	Unit Power Supply (UPS)	:	1	unit
5	Peralatan studio visual lain-lain	:	5	unit
6	Breket LCD/TV	:	13	unit
7	Handy cam	:	3	unit
8	Infocus	:	3	unit
9	Peralatan studio video dan film lain-lain	:	2	unit
10	Camera electronic	:	3	unit
11	Video monitor	:	1	unit
12	Tripod camera	:	2	unit
13	Layar film	:	1	unit
14	Sound system	:	4	unit
15	Telephone (PABX)	:	1	unit
16	Pesawat telephone	:	20	unit
17	Alat komunikasi lain-lain	:	27	unit
18	Wireless amplifier	:	1	unit
D. Alat Laboratorium				
1	Personal komputer	:	2	unit
2	Alat laboratorium lainnya	:	20	unit
3	Alat laboratorium penunjang lainnya	:	8	unit
4	Software cont off-line computer	:	2	unit
5	Alat Keamana Lain-lain	:	1	unit
E. Bangunan				
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	:	6	unit
2	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	:	2	unit
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	:	4	unit
4	Bangunan Gudang Lain-lain	:	3	unit
5	Gedung Pos jaga Permanen	:	1	unit
6	Bangunan Menara/pagar	:	1	unit
7	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	:	2	unit
8	Asrama Permanen	:	5	unit
9	Bangunan Pengambilan Air Bersih dan lain-lain	:	1	unit
10	Bangunan Penampung Air Baku	:	1	unit
11	Bangunan Pembuangan air kotor lain-lain	:	1	unit
F. Lain-lain				
1	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas sedang	:	2	unit
2	Instalasi Gardu Listrik Induk lain-lain	:	1	unit
3	Instalasi Gardu Listrik distribusi lain-lain	:	2	unit
4	Jaringan LAN/WAN/Internet	:	10	unit
5	Buku Umum lain-lain	:	1	buah
6	Lukisan lain-lain	:	1	buah
7	Alat Voley	:	12	buah
8	Alat Tenis Meja	:	5	buah

9	Alat Badminton	:	13	buah
10	Alat Olahraga lain-lain	:	4	buah
11	Kontruksi dalam Pengerjaan	:	1	unit

1.3. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun 2015, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Lembaran Negara Nomor 112;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau;
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2000 – 2020;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019;
19. Rencana Strategis (Renstra) BKD Provinsi Riau tahun 2014-2018.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan kepegawain Daerah Provinsi Riau tahun 2014 ini dimaksudkan sebagai gambaran umum rencana kerja yang menjadi target pencapaian tahun 2014 sehingga dapat menjadi instansi yang akuntabel dan tepat sasaran dalam rangka mewujudkan aparatur yang handal dan professional yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Tujuan dari Kinerja Tahunan Badan kepegawain Daerah Provinsi Riau tahun 2014 adalah dapat mewujudkan akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah dan sebagai perwujudan salah satu kewajiban dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran sehingga menghasilkan manfaat antara lain :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Badan kepegawaian Daerah provinsi Riau,
- b. Sebagai umpan balik Peningkatan Kinerja Instansi pemerintah Badan kepegawaian Daerah provinsi Riau,
- c. Meningkatkan perencanaan disemua bidang Badan kepegawaian Daerah provinsi Riau dimasa yang akan datang,
- d. Meningkatkan Kredibilitas Badan kepegawaian Daerah provinsi Riau dimata instansi pemerintah lainnya,
- e. Menjadikan aparatur yang professional, akuntabel dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Provinsi Riau.

BAB II

RENCANA STRATEGI

2.1. Rencana Strategik

2.1.1. Visi dan Misi

Visi dan misi memiliki kedudukan penting dalam suatu organisasi. Oleh sebab itu perumusan visi dan misi perlu dilakukan secara seksama dengan melibatkan berbagai stakeholders yang terkait dengan tupoksi. Secara konseptual, Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini. Sebagai sebuah tujuan, visi bukan sekedar harapan maupun mimpi. Visi merupakan tujuan yang dapat diperkirakan kapan dapat dicapai. Selain itu juga bagaimana cara mencapainya.

Rencana Kerja Tahunan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau tahun 2015, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Visi Misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau adalah:

“Terwujudnya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagai pusat pembangunan, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara untuk mewujudkan reformasi birokrasi menuju visi Riau 2025”

Makna yang terkandung dalam visi:

- a. *Pusat pembangunan* adalah pusat pembangunan aparatur sipil negara yang berlandaskan pada prinsip, nilai dasar dan kode etik ASN;
- b. *Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara* adalah pusat penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur Sipil negara yang berdasarkan azas ASN;
- c. *Mewujudkan Reformasi Birokrasi* adalah melakukan perubahan dan pembaharuan yang mendasar secara bertahap dan berkelanjutan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi birokrasi yang bersih dan melayani.

Misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau adalah :

Rumusan misi ditetapkan berdasarkan visi dengan memperhatikan lingkungan strategis baik, internal maupun eksternal. Aspek internal menyangkut kekuatan dan kelemahan. Sedangkan aspek eksternal menyangkut peluang dan ancaman. Berdasarkan rumusan visi dan telaah lingkungan strategis, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Riau menetapkan misi 2014-2019 sebagai berikut:

- 1) Membangun aparatur sipil negara pemerintah provinsi Riau yang berlandaskan prinsip, nilai dasar dan kode etik ASN melalui pengelolaan manajemen aparatur sipil negara yang berlandaskan azas ASN;
- 2) Menyelenggarakan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang sesuai dengan azas ASN.

Makna yang terkandung dalam misi tersebut adalah:

- a. **Membangun aparatur sipil Negara pemerintah provinsi Riau yang berlandaskan prinsip, nilai dasar, dan kode etik ASN melalui pengelolaan manajemen apartur sipil negara yang berlandaskan azas ASN** adalah membangun aparatur sipil negara sebagai profesi yang didasari atas nilai dasar, kode etik, kode perilaku, komitmen, integritas moral dan bertanggung jawab pada pelayanan publik berdasarkan kualifikasi akademik serta kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas melalui penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara yang berlandaskan azas ASN;
- b. **Menyelenggarakan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang sesuai dengan azas ASN** adalah melakukan pelaksanaan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan kepastian hukum, profesionalitas, proposionalitas, keterpaduan, delegasi, netralisasi, akuntabilitas, efektif, efisien keterbukaan, nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan.

2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator, Strategi dan Kebijakan

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator, Strategi dan Kebijakan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau menjabarkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai secara tahunan selama periode Renstra tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator BKP2D Tahun 2014

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya aparatur sipil negara yang memiliki prinsip, nilai dasar dan kode etik ASN melalui manajemen ASN yang berlandaskan azas ASN	1.1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil negara dengan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN)	1.1.1. Presentase aparatur sipil negara yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) bersertifikasi
		1.2. Peningkatan disiplin aparatur negara yang berlandaskan prinsip, nilai dasar dan kode etik	1.2.1. Presentase menurunnya Aparatur Sipil Negara dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi
		1.3. Peningkatan pemahaman aparatur sipil negara tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan	1.3.1. Presentase Aparatur Sipil Negara yang meningkat pemahamannya tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan
		1.4. Meningkatkan kualitas pendidikan PNS melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan	1.4.1. Jumlah Aparatur Sipil Negara yang meningkat tingkat pendidikan melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan
		1.5. Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	1.5.1. Presentase aparatur sipil negara yang memenuhi kebutuhan dasar dengan meningkat kesejahteraannya
2.	Terwujudnya penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara sesuai dengan azas ASN melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi	2.1. Peningkatan pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi	2.1.1. Presentase penyelesaian pelayanan adminitrasi aparatur sipil negara
		2.2 Peningkatan sarana dan prasarana kantor modern berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan manajemen ASN yang prima agar efisien dan efektif	2.2.1. Presentase peningkatan sarana dan prasarana yang berbasis kantor modern berbasis sistem teknologi untuk meningkatkan pelayanan manajemen aparatur sipil Negara

B. Strategi

- 1) Meningkatkan SDM aparatur sipil negara untuk pengembangan karier aparatur sipil negara berdasarkan pengembangan kompetensi melalui pendidikan, dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran yang bersertifikasi;
- 2) Peningkatan kualitas aparatur sipil negara yang bersih dari paraktek korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penegakan peraturan disiplin dan kode etik perilaku aparatur sipil negara;
- 3) Penyelenggaraan sosialisasi, seminar dan penataran tentang peraturan terkait dengan kebijakan aparatur sipil negara;
- 4) Peningkatan fasilitas tugas belajar dan memberikan kemudahan bagi PNS yang akan meningkatkan pengetahuan dan keahliannya melalui tugas belajar mandiri, ijin belajar, beasiswa serta peningkatan dalam pelatihan kepemimpinan dengan menerapkan konsep pelatihan kepemimpinan pola baru;
- 5) Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara melalui :
 - a. Tambahan penghasilan aparatur sipil negara yang meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan berdasarkan penilaian pencapaian kinerja dan indeks harga yang berlaku;
 - b. Memberikan fasilitas kepada PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memberikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi PNS sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
 - d. Memberikan perlindungan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum bagi aparatur sipil Negara.
- 6) Menerapkan *merit system* dalam pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi;
- 7) Rehabilitasi sarana dan prasarana menjadi kantor modern berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan manajemen ASN yang prima serta pengembangan pusat *assesment center* dan pembangunan pusat pendidikan pelatihan berbasis teknologi yang terakreditasi.

C. Kebijakan

Kebijakan yang disusun oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Riau untuk mendukung terlaksananya misi serta strategi yang ada adalah sebagai berikut:

Meningkatkan SDM aparatur sipil negara untuk pengembangan karier Aparatur Sipil Negara berdasarkan pengembangan kompetensi melalui pendidikan, dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran yang bersertifikasi.

Kebijakan :

- a. Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan bersertifikasi didasarkan prioritas dan hasil analisis kebutuhan pelatihan yang menunjang perkembangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA);
- b. Pengembangan dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas tenaga pengajar/widyaiswara bersertifikasi;
- c. Pengembangan dan peningkatan kualitas asesor melalui kerja praktek dan pelatihan untuk menghasilkan asesor yang bersertifikasi dengan standarisasi dari Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP).

Peningkatan kualitas aparatur sipil negara yang bersih dari paraktek korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penegakan peraturan disiplin dan kode etik perilaku aparatur sipil negara.

Kebijakan :

- a. Penegakan peraturan disiplin aparatur sipil negara, kode etik dan perilaku aparatur sipil negara dan kode etik profesi;
- b. Penerapan penyampaian tentang laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHK-ASN) bagi seluruh aparatur sipil negara;
- c. Pemberian penghargaan terhadap aparatur sipil negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya;
- d. Penerapan sistem penilaian kinerja aparatur sipil negara yang didasarkan sistem prestasi dan karier yang dilakukan oleh tim penilai kinerja aparatur sipil Negara.

Penyelenggaraan sosialisasi, seminar dan penataran tentang peraturan terkait dengan kebijakan aparatur sipil negara.

Kebijakan:

Peningkatan wawasan aparatur sipil negara melalui sosialisasi, seminar, dan penataran tentang penyelenggaraan kebijakan Aparatur Sipil Negara dalam sistem pemerintahan.

Peningkatan fasilitas tugas belajar dan memberikan kemudahan bagi PNS yang akan meningkatkan pengetahuan dan keahliannya melalui tugas belajar mandiri, ijin belajar serta peningkatan dalam pelatihan kepemimpinan dengan menerapkan konsep pelatihan kepemimpinan pola baru.

Kebijakan :

Pemberian kemudahan peningkatan pendidikan pelatihan, bagi PNS yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan melalui tugas belajar mandiri, beasiswa dan penerapan pola pendidikan baru bagi pelatihan kepemimpinan untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi.

Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara

Kebijakan :

- a. Pemberian penambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara berupa tunjangan meliputi tunjangan kinerja dibayarkan dengan penilaian kinerja dan tunjangan kemahalan dibayarkan dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku;
- b. Pemberian fasilitas kepada PNS dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemberian jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi PNS sesuai dengan ketentuan undang- undang yang berlaku;
- d. Pemberian perlindungan bagi aparatur sipil negara berupa jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan bantuan hukum.

Menerapkan *merit system* dalam pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi.

Kebijakan :

- a. Penerapan proses pengadaan aparatur sipil negara secara terbuka, transparan, dan objektifitas melalui kompetensi, kualifikasi untuk mendapatkan aparatur sipil negara yang berkualitas;
- b. Penyusunan dan penetapan kebutuhan melalui penataan aparatur Sipil Negara yang ideal sesuai kebutuhan dan kompetensi (*right sizzing*) dengan pemetaan (*Mapping*);
- c. Penerapanan penyusunan pola karier PNS yang terintegrasi secara nasional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional;
- d. Penerapan *merit system* untuk mutasi dan promosi PNS;
- e. Penerapan pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis *E-Kepegawaian*;
- f. Penerapan, evaluasi dan pembaharuan standar operasional prosedur (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan manajemen aparatur sipil negara untuk meningkatkan mutu pelayanan manajemen aparatur sipil negara;
- g. Penyelenggaraan survey indeks kepuasan pelayanan manajemen aparatur sipil Negara.

Rehabilitasi sarana dan prasarana menjadi kantor modern berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan manajemen ASN yang prima serta pengembangan Pusat *assesment center* dan pembangunan pusat pendidikan pelatihan berbasis teknologi yang terakreditasi.

Kebijakan :

- a. Peningkatan prasarana dan sarana kantor untuk pelayanan manajemen apartur sipil negara melalui sistem informasi berbasis *E-Government* perkantoran modern dengan sistem, informasi teknologi secara elektronik;
- b. Membangun UPT *Aessment* untuk pengembangan dan pelaksanaan *asesmnet center* provinsi Riau dengan fasilitas dan sarana yang sesuai standar dan terakreditasi untuk pelaksanaan *asesment*;
- c. Menjadikan UPT Pendidikan dan Pelatihan menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan dengan fasilitas prasarana dan media pembelajaran yang sesuai dengan standar diklat terakreditasi berbasis modern dengan sistem informasi dan teknologi.

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dalam rangka menuju pencapaian Visi dan Misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau, maka pada tahun 2015 Rencana Kinerja Tahunan yang akan dilaksanakan dapat tergambar sebagai berikut:

3.1. Indikator Kinerja Utama

**Tabel 3.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2015
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1.1. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur sipil negara dengan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN)	1.1.1. Presentase aparatur sipil negara yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) bersertifikasi	7%
	1.2. Peningkatan disiplin aparatur negara yang berlandaskan prinsip, nilai dasar dan kode etik	1.1.2. Presentase menurunnya aparatur sipil negara dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi	15%
	1.3. Peningkatan pemahaman aparatur sipil negara tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan	1.3.1 Presentase Aparatur Sipil Negara yang meningkat pemahamannya tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan	10%
	1.4. Meningkatkan tingkat pendidikan melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan	1.4.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara yang meningkat tingkat pendidikan melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan	240 orang
	1.5. Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	1.5.1 Presentase Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kebutuhan dasar dengan meningkat kesejahteraannya	75%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	2.1. Peningkatan pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi	2.1.1. Presentase penyelesaian pelayanan administrasi aparatur sipil negara	80%
	2.2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Modren berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang prima ,efesien dan efektif	2.2.1. Presentase peningkatan sarana dan prasarana yang berbasis kantor modern berbasis sistem teknologi untuk menignkatkan pelayanan manajemen aparatur sipil negara	48%

3.2. Program dan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang, pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau adalah pelayanan berupa urusan kepegawaian kepada aparatur pemerintah. Pada Tahun 2015 terdapat 9 (sembilan) program dengan 120 kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

(14 Kegiatan)

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat;
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- 3) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- 4) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional;
- 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- 6) Penyediaan alat tulis kantor;
- 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- 9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- 10) Penyediaan makan dan minum;
- 11) Rapat Koordinasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan se-Provinsi Riau.
- 12) Penyediaan jasa keamanan kantor;
- 13) Pameran pembangunan provinsi Riau (Riau Expo);
- 14) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(4 kegiatan)**

- 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor;
- 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor.

**3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
(7 kegiatan)**

- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
- 2) Pelaksanaan sumpah/janji PNS;
- 3) Pemantauan disiplin PNS;
- 4) Penanganan kasus kepegawaian;
- 5) Koordinasi pemantauan disiplin Aparatur se-Provinsi Riau;
- 6) Pelaksanaan konseling psikologin ASN;
- 7) Pelaksanaan Pokja KPK Provinsi Riau.
- 8)

**4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(24 Kegiatan)**

- 1) Diklat Kompetensi dan pengembangan widyaiswara;
- 2) Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau;
- 3) Diklat *Training of Trainers* (TOT) widyaiswara;
- 4) Diklat *Training of Fasilitator* (TOF);
- 5) Diklat *Training Officer Course* (TOF);
- 6) Diklat *Management of Training* (MOT);
- 7) Diklat Luar Negara (Kerjasama dengan pemerintah Singapore);
- 8) Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau;
- 9) Diklat Analisis Kebutuhan Diklat;
- 10) Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah;
- 11) Diklat Teknis Administrasi Kearsipan;
- 12) Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas;
- 13) Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian;
- 14) Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- 15) Diklat Teknis Perumusan Standar Kompetensi;
- 16) Diklat Penata Usahaan Keuangan Daerah;
- 17) Diklat Bendahara Keuangan Daerah;
- 18) Diklat Pengelolaan Aset Daerah;

- 19) Diklat Teknis Pelayanan Publik yang Prima dan Berwawasan Good Governance;
- 20) Diklat Pengembangan E-Government;
- 21) Diklat Perencanaan Tingkat Dasar;
- 22) Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- 23) Diklat Bahasa Inggris (TOEFL)
- 24) Diklat Pengembangan Potensi Akademik.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(9 Kegiatan)

- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- 2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
- 3) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran;
- 4) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
- 5) Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD;
- 6) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
- 7) Penyusunan Perjanjian Kinerja (Penja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- 8) Pelaporan barang milik daerah;
- 9) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

6. Program Pendidikan Kedinasan Aparatur Sipil Negara

(8 kegiatan)

- 1) Beasiswa Tugas Belajar Aparatur Sipil Negara;
- 2) Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat I (DIKLATPIM I);
- 3) Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II (DIKLATPIM II);
- 4) Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III (DIKLATPIM III);
- 5) Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV (DIKLATPIM IV);
- 6) Seleksi Diklat Kepemimpinan (PIM 2,3,4)
- 7) Diklat prajabatan calon pegawai negeri sipil golongan III;
- 8) Diklat prajabatan calon pegawai negeri sipil golongan II.

7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

(34 kegiatan)

- 1) Bimtek pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- 2) Bimtek penyusunan formasi pengadaan PNS provinsi Riau;
- 3) Bimtek Teknis Manajemen Kontrak bagi Aparatur Sipil Negara;
- 4) Bimtek Teknis Manajemen Konstruksi bagi Aparatur Pemerintah Provinsi Riau;
- 5) Bimtek Pelaksanaan PP No.46 Tahun 2011;
- 6) Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional bagi PNS Provinsi Riau;
- 7) Sosialisasi Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010;
- 8) Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara;
- 9) Workshop kegiatan PPTK;
- 10) Pendidikan, Pelatihan, Kursus, dan Bimtek Pegawai BKD;
- 11) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Paratur BKD;
- 12) Assessment Center Provinsi Riau;
- 13) Peningkatan sumber daya aparatur dengan Emotional Spritual Quotient Tarining;
- 14) Pembinaan olah raga PNS Pemerintah Provinsi Riau;
- 15) Pembinaan fisik dan mental Aparatur;
- 16) Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Perencana Aparatur;
- 17) Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Analisis Kepegawaian;
- 18) Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Peneliti;
- 19) Monitoring IPDN;
- 20) Monitoring Evaluasi Kediklatan Aparatur Sipil Negara;
- 21) Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau;
- 22) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PP 46 Tahun 2011;
- 23) Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se-Provinsi Riau;
- 24) Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
- 25) Seleksi penerimaan IPDN;

- 26) Pengelolaan Ujian Dinas, dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- 27) Rakor Widiyaiswara;
- 28) Orasi Ilmiah WIdiyaiswara;
- 29) Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat;
- 30) Pengadaan E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau;
- 31) Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document);
- 32) Pengelolaan data kepegawaian;
- 33) Pengelolaan web site Badan Kepegawaian Daerah;
- 34) Pengelolaan Humas BKD;

8. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara (15 kegiatan)

- 1) Pengelolaan administrasi pindah tugas Aparatur Sipil Negara;
- 2) Pengelolaan Pensiun PNS;
- 3) Monitoring, evaluasi dan orientasi pelaksanaan administrasi pengangkatan pejabat struktural eselon II;
- 4) Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Struktural dilingkungan Pemda Provinsi Riau;
- 5) Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah dan Jabatan Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau;
- 6) Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se-Provinsi Riau;
- 7) Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dibawah binaan BKP2D Provinsi Riau;
- 8) Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Fungsional Tertentu;
- 9) Pengelolaan dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik;
- 10) Pengelolaan Administrasi Izin Belajar;
- 11) Pengelolaan Adminitrasi Kepegawaian;
- 12) Pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik;
- 13) Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau;

- 14) Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Provinsi Riau Berbasis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja;
- 15) Satya Lencana Karya Satya.

**9. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
(4 kegiatan)**

- 1) Orientasi Aparatur Sipil Negara purna bakti;
- 2) Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS;
- 3) Pemberian Penghargaan bagi PNS;
- 4) Monitorig dan Evaluasi Tapetarum dan Taspem PNS se Provinsi Riau

Tabel 3.2. Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Riau Tahun 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil negara dengan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN)	1.1.1. Presentase aparatur sipil negara yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) bersertifikasi	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		7 %	5.000.050.000
				1 Diklat Kompetensi dan Pengembangan Widyaiswara	17 Orang Widyaiswara	500.000.000
				2 Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	11 Orang	300.000.000
				3 Diklat TOT Widyaiswara	15 Orang/ 8 hari	262.612.000
				4 Diklat Training of Fasilitator (TOF)	30 Orang/ 10 hari	201.667.000
				5 Diklat Training Officer Course (TOC)	30 Orang/13 hari	280.610.000
				6 Diklat Management of Training (MOT)	30 Orang/15 hari	280.610.000
				7 Diklat Luar Negeri (Kerjasama dengan pemerintah Singapore)	20 Orang	400.000.000
				8 Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	11 Orang	300.000.000
				9 Diklat Analisis Kebutuhan Diklat	60 Orang/ 6hari	174.316.500
				10 Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja	40 Orang/ 7 hari	192.605.000
				11 Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah	60 Orang/10 hari	150.000.000

				12	Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian	60	Orang/ 10 hari	138.000.000
				13	Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas	30	Orang/ 8 hari	74.068.500
				14	Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian	30	Orang/5 hari	78.688.500
				15	Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur	30	Orang/ 6 hari	58.288.500
				16	Diklat Teknis Perumusan Standar Kompetensi	30	Orang/7 hari	134.935.000
				17	Diklat Penata Usahaan Keuangan Daerah	30	Orang/10 hari	98.500.000
				18	Diklat Bendahara Keuangan Daerah	30	Orang/15 hari	135.000.000
				19	Diklat Pengelolaan Aset Daerah	60	Orang/15 hari	174.390.000
				20	Diklat Teknis Pelayanan Publik yang prima dan berwawasan Good Governance	60	Orang/7 hari	250.000.0000
				21	Diklat Pengembangan E-Government	30	Orang/10 hari	200.000.000
				22	Diklat Perencanaan Tingkat Dasar	30	Orang/18 hari	250.000.000
				23	Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	30	Orang/10 hari	200.000.000
				24	Diklat Bahasa Inggris (TOEFL)	60	Orang/6 hari	91.751.000
				25	Diklat Pengembangan Potensi Akademik	30	Orang	74.069.000
	1.2. Peningkatan disiplin aparatur negara yang berlandaskan prinsip, nilai dasar dan kode etik	1.2.1. Presentase menurunnya Aparatur Sipil Negara dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			15 %	1.653.230.000

				1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	202	stel	160.443.500
				2	Pelaksanaan sumpah / janji PNS	150	Orang	67.250.000
				3	Pemantauan Disiplin PNS	1	Tahun	418.608.000
				4	Penanganan Kasus kasus Kepegawaian	1	Tahun	220.830.500
				5	Koordinasi Pemantauan Disiplin Aparatur se-Provinsi Riau	1	Tahun	250.000.000
				6	Pelaksanaan Konseling Psikologi Permasalahan ASN	80	Orang	375.000.000
				7	Pelaksanaan Pokja KPK Provinsi Riau	50	Orang	161.098.000
	1.3. Peningkatan pemahaman aparatur sipil negara tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan	1.3.1 Presentase Aparatur Sipil Negara yang meningkat pemahamannya tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR			15 %	16.541.9178.950
				1	Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	70	Orang	168.503.200
				2	Bimtek Penyusunan Formasi Pengadaan PNS Provinsi Riau	1	Kegiatan	274.540.900
				3	Bimtek Teknis Manajemen Kontrak Bagi Aparatur Pemerintah Provinsi Riau	75	Orang	301.100.350
				4	Bimtek Teknis Manajemen Konstruksi Bagi Aparatur Pemerintah Provinsi Riau	50	Orang	250.000.000
				5	Bimtek Pelaksanaan PP No.46 Tahun 2011	1	Kegiatan	180.000.000
				6	Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional bagi PNS Provinsi Riau	1	Kegiatan Sosialisasi	200.000.000

				7	Sosialisasi Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010	70	Orang	166.700.000
				8	Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara	200	Orang	250.000.000
				9	Workshop Kegiatan bagi PPTK	75	Orang	145.844.500
				10	Pendidikan, Pelatihan,Kursus,dan Bimtek Pegawai BKD	30	Orang	431.200.000
				11	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKD	168	Orang	435.000.000
				12	Assessment Center Provinsi Riau	220	Orang	1.756.000.000
				13	Peningkatan Sumber Daya Aparatur dengan Emotional Spritual Qutient Training	100	Orang	212.828.200
				14	Training Motivasi Aparatur Sipil Negara	100	Orang	300.000.000
				15	Pembinaan Olah Raga PNS Pemerintah Provinsi Riau	22	Orang	376.704.000
				16	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	1	Tahun	161.298.000
				17	Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional,perencana aparatur	20	Orang	1.200.000.000
				18	Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional,analisis kepegawaian	20	Orang	600.000.000

				17	Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, peneliti	35	Orang	1.200.000.000
				18	Monitoring IPDN	1	Dokumen	241.389.000
				19	Monitoring dan Evaluasi Kediklatan Aparatur Sipil Negara	1	Dokumen	166.810.600
				20	Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Rlau	1	Dokumen	200.000.000
				21	Koordinasi dan SIngkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011	1	Dokumen	228.939.000
				22	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan SIMPEG din Pemerintahan Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau	1	Dokumen	173.243.600
				23	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	10000	Orang	1.233.490.000
				24	Seleksi Penerimaan IPDN	100	Orang	750.000.000
				25	Pengelolaan Ujian Dinas, dan Ujian Kenaikan Pangkat			280.236.000
				26	Rakor Widyaiswara	12	Kabupaten/ kota dan Provinsi	221`.093.400
				27	Orasi Ilmiah Widyaiswara	3	Orang	200.994.000

				28	Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat	1	Dokumen	250.000.000
				29	Pengadaan E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau	1	Paket	3.000.000.000
				30	Pengembangan dan Pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document)	5000	Dokumen	200.000.000
				31	Pengelolaan data kepegawaian	1	Kegiatan	295.277.000
				32	Pengelolaan web site Badan Kepegawaian Daerah	70	Berita	102.190.000
				8	Pengelolaan Humas BKD	1	Dokumen	220.000.000
	1.4. Meningkatkan kualitas pendidikan PNS melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan	1.4.1. Jumlah Aparatur Sipil Negara yang meningkat tingkat pendidikan melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan		PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN		391	orang	8.253.615.000
				1	Pemberian beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas	29	Orang	3.710.323.000
				2	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	1	Orang	84.418.000

				3 Pendidikan dan pelatihan struktual bagi PNS Daerah (PIM II)	8 Orang	735.000.000
				4 Pendidikan dan pelatihan struktual bagi PNS Daerah (PIM III)	40 Orang/ 93 hari	1.418.874.000
				5 Pendidikan dan pelatihan struktual bagi PNS Daerah (PIM IV)	60 Orang/93 hari	1.280.000.000
				6 Seleksi Diklat Kepemimpinan (PIM 2,3,4)	100 Orang	125.000.000
				7 Diklat prajabatan CPNS daerah Gol. III	40 Orang/98 hari	550.000.000
				8 Diklat prajabatan CPNS daerah Gol. II	40 Orang/98 hari	350.000.000
	1.5. Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	1.5.1. Presentase aparatur sipil negara yang memenuhi kebutuhan dasar dengan meningkat kesejahteraannya		PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN APARATUR	80 %	1.923.175.000
				1 Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti	300 Orang	791.350.000
				2 Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Memasuki Masa Pensiun	80 Orang	110.250.500
				3 Pemberian Penghargaan bagi PNS	36 Orang	870.325.000
				4 Monitoring dan Evaluasi Tapetarum, dan Taspem PNS se Provinsi Riau	Kegiatan	151.250.000
				5 Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Memasuki Masa Pensiun	75 Orang	106.300.100

2.	2.1. Peningkatan pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi	2.1.1. Presentase penyelesaian pelayanan adminitrasi aparatur sipil negara		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA	82 %	4.075.616.200
				1 Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS	1 Tahun	150.000.000
				2 Pengelolaan Pensiun PNS	318 Oarng	168.741.000
				3 Monitoring Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II	1 Dokumen	197.932.000
				4 Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Struktural di Lingkungan Pemda Provinsi Riau	1 Dokumen	306.00.000
				5 Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah dan Jabatan Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau	12 Kabupaten/Kota	285.000.000
				6 Pengelolaan kenaikan pangkat PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau	2.750 SK	510.892.000
				7 Pengelolaan penetapan angka kredit jabatan fungsional widiyaiswara Provinsi Riau	50 Orang	143.489.000
				8 Pengelolaan Adminitrasi dan Penataan jabatan Fungsional Tertentu	2500 Orang	464.448.000
				9 Pengelolaan dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik	218 SOP	165.000.000

				10	Pengelolaan Administrasi Izin Belajar	1	Kegiatan	52.743.000
				11	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1	Kegiatan	114.629.000
				12	Pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik	1	Kegiatan	193.844.200
				13	Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau	1	Kegiatan	359.040.000
				14	Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	1	Kegiatan	538.508.000
				15	Staya Lencana Karya Satya	330	Orang	423.350.000
	2.2. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.2.1. Presentase sistem laporan capaian dan keuangan yang meningkat		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			10 %	565.183.900
				1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Dokumen	96.800.000
				2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	1	Dokumen	55.000.000
				3	Penyusunan pelaporan Prognosis realisasi Anggaran	1	Dokumen	55.000.000
				4	Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun	1	Dokumen	55.000.000
				5	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	1	Dokumen	148.385.300
				7	Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	3	Dokumen	103.237.600

				8	Pelaporan barang milik daerah	1	Dokumen	51.761.000
				9	Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan	1	Dokumen	168.535.400
	2.3. Peningkatan sarana dan prasarana kantor modern berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan manajemen ASN yang prima agar efisien dan efektif	2.3.1. Presentase peningkatan sarana dan prasarana yang berbasis kantor modern berbasis sistem teknologi untuk meningkatkan pelayanan manajemen aparatur sipil Negara		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA			20 %	4.395.879.600
				1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2	Kegiatan	635.650.000
				2	Pemeliharaan Rutin/Peralatan Gedung Kantor	1	Tahun	57.296.000
				3	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	1	Paket	3.500.000.000
				4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	1	Tahun	202.933.200
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA			48%	8.998.374.350
				1	Penyediaan jasa surat menyurat	12	bulan	47.877.500
				2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	1.009.250.000
				3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Unit	2.877.321.700
				4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	11 5	Unit Mobil Unit Motor	412.037.000
				5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	Bulan	1.175.448.000

				6	Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	474.819.300
				7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.752 Set 6.411 Buah 389 Buku 663 Blok 170 Paket 509 Rim 168 Pax 780 dus	322.207.600
				8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	948 Buah 11 roll	82.500.000
				9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	128 Buku 1.488 Ex Majalah	208.120.000
				10	Penyediaan makanan dan minuman	11.388 OK 586 orang	210.760.000
				11	Penyediaan jasa keamanan kantor	14 Orang 1 Penjaga 30 Orang 119 Pengawas 56 Stell 4 Buah 1 Pasang 4 Unit 1 Kegiatan Belanja pelatihan	915.430.250
				12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Kabupaten/kota di Provinsi Riau, Jakarta dan Provinsi lainnya	844.338.200
				13	Rapt Koordinasi BKP2D se-Provinsi Riau	1 Dokumen	195.000.000
				14	Pameran pembangunan Provinsi Riau (Riau expo)	1.000 Orang	223.264.800

3.3. Alokasi Anggaran

Alokasi Keuangan BKPPD Provinsi Riau Tahun 2015

No.	Uraian	Pagu	Persentase (%)
1	Belanja Tidak Langsung	Rp.24.458.276.431,69	32,24 %
2	Belanja Langsung	Rp.51.407.042.500,00	67,76 %
	TOTAL	Rp.75.865.318.931,69	100 %

Adapun rincian dari belanja langsung dapat dilihat dari perprogram sebagai berikut :

Realisasi Keuangan Belanja Langsung BKP2D Provinsi Riau Tahun 2015

No	Program	Pagu	Persentase (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 8.998.374.350,00	11,86 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 4.395.879.600,00	5,79 %
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 1.653.230.000,00	2,18 %
4	Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Rp. 5.000.050.000,00	6,60 %
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 733.719.300,00	0,97 %
6	Program Pendidikan Kedinasan	Rp. 8.253.615.000,00	10,87 %
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp.16.373.382.550,00	21,58 %
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 4.075.616.200,00	5,37 %
9	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	Rp. 1.923.175.500,00	2,53 %
	TOTAL	Rp.51.407.042.500,00	81.39%

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat diuraikan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian Pendidikand dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai peran terdepan dalam mengemban amanat pemerintah untuk menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara dimana program dan kegiatan disusun untuk mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral etika, akuntabel dan sejahtera yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2. Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau 2015 disusun sesuai dengan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau;

4.2. Saran

1. Diperlukan Komitmen dan dukungan dari semua pihak Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi masing – masing sehingga dapat menjalankan system pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan aparatur dan masyarakat.
2. Diperlukan koordinasi yang lebih dari berbagai bidang yang ada pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau maupun dengan instansi lain yang terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan demi pencapaian target yang lebih optimal.